

ABSTRAK

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban ruang publik, khususnya pada kawasan yang dianggap mengganggu fungsi infrastruktur seperti jalur rel kereta api. Fenomena tersebut terjadi di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, di mana pedagang memanfaatkan area sekitar rel kereta api sebagai tempat berdagang. Pemerintah kemudian melakukan relokasi pedagang ke pasar baru yang dibangun sebagai alternatif lokasi perdagangan. Namun, dalam pelaksanaannya, pasar baru tersebut tidak berfungsi secara optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pasar baru pasca relokasi pedagang serta menganalisis penyebab pedagang kembali berjualan di lokasi lama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pedagang kaki lima, masyarakat sekitar pasar, dan aparat desa, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton untuk menganalisis fungsi manifes, fungsi laten, serta disfungsi dari kebijakan relokasi pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar baru belum mampu menjalankan fungsi manifesnya sebagai pusat perdagangan akibat keterbatasan akses jalan, lokasi pasar yang kurang mudah dijangkau, kapasitas kios yang tidak sebanding dengan jumlah pedagang, serta lemahnya pengelolaan fasilitas pasar. Kondisi tersebut menimbulkan disfungsi sosial dan ekonomi yang ditandai dengan rendahnya aktivitas perdagangan dan minimnya kunjungan pembeli. Selain itu, tidak adanya penegakan aturan secara tegas menyebabkan terbentuknya legitimasi sosial terhadap lokasi lama sebagai ruang perdagangan alternatif. Situasi tersebut merupakan manifestasi dari disfungsi struktural yang mendorong pedagang kembali berjualan di sekitar rel kereta api sebagai bentuk adaptasi terhadap struktur ruang yang dianggap lebih mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Relokasi Pedagang, Disfungsi Struktural, Fungsionalisme Struktural.

ABSTRACT

The arrangement of street vendors is one of the government's efforts to create order in public spaces, particularly in areas considered to disrupt infrastructure functions such as railway lines. This phenomenon occurred in Lancang Barat Village, Dewantara District, North Aceh Regency, where vendors utilized the area around the railway tracks as a trading location. The government then relocated the vendors to a newly built market as an alternative trading site. However, in practice, the new market has not functioned optimally as a center of economic activity for the community. This study aims to describe the condition of the new market after the relocation of vendors and to analyze the factors causing vendors to return to their previous trading location. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques include observation, in-depth interviews with street vendors, local community members, and village officials, as well as documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This study applies Robert K. Merton's structural functionalism theory to analyze the manifest functions, latent functions, and dysfunctions of the vendor relocation policy. The results show that the new market has not been able to perform its manifest function as a trading center due to limited road access, a market location that is difficult to reach, kiosk capacity that is not proportional to the number of vendors, and weak management of market facilities. These conditions create social and economic dysfunctions characterized by low trading activity and minimal buyer visits. In addition, the absence of strict law enforcement has led to the formation of social legitimacy toward the old location as an alternative trading space. This situation encourages vendors to return to trading around the railway tracks as a form of adaptation to a spatial structure that is considered more supportive of sustainable economic activities.

Keywords: *Street Vendors, Vendor Relocation, Structural Dysfunction, Structural Functionalism.*